

## **Deterministik Realisme: Analisa Potensi Aneksasi Taiwan oleh Tiongkok**

*Muhammad Arrafi Rizcy Deanto<sup>1\*</sup>, Nur Isdah Idris<sup>1</sup>*

<sup>1</sup>*International Relations Department, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin University, Makassar, 90245*

*\*Correspondence's email: rafirezcy17@gmail.com*

---

### **Abstract**

*The situation between China and Taiwan has long been characterized by tension and the potential for military conflict. China asserts its sovereignty claim over the island of Taiwan and does not hesitate to threaten military action if Taiwan officially proclaims independence. This study aims to analyze the possibility of China's annexation of Taiwan through the lens of deterministic realism, a perspective that emphasizes the role of military power in maintaining the balance of power and preventing open conflict. By evaluating factors such as military capabilities, strategic alliances, and national interests, this research seeks to provide in-depth insights into the potential for conflict in the Taiwan Strait and its implications for power dynamics in the region. Through factors such as China's military superiority, strategic alliances and national interests driving annexation, the possibility of China's annexation of Taiwan becomes very real.*

*Keywords: deterministic realism, Taiwan, China, annexation, balance of power*

---

### **Abstrak**

Situasi antara Tiongkok dan Taiwan telah lama diwarnai oleh ketegangan dan potensi konflik militer. Tiongkok menegaskan klaim kedaulatannya atas pulau Taiwan dan tidak segan mengancam tindakan militer jika Taiwan memproklamasikan kemerdekaan secara resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan aneksasi Taiwan oleh Tiongkok melalui sudut pandang deterministik realisme, sebuah perspektif yang menekankan pada peran kekuatan militer dalam menjaga keseimbangan kekuatan dan mencegah konflik terbuka. Dengan mengevaluasi faktor-faktor seperti kapabilitas militer, aliansi strategis, dan kepentingan nasional, penelitian ini berupaya memberikan wawasan mendalam tentang potensi konflik di Selat Taiwan dan implikasinya bagi dinamika kekuatan di kawasan tersebut. Melalui faktor-faktor seperti keunggulan militer Tiongkok, aliansi strategis, dan kepentingan nasional yang mendorong aneksasi, kemungkinan aneksasi Taiwan oleh Tiongkok menjadi sangat nyata.

*Kata kunci: deterministik realisme, Taiwan, Tiongkok, aneksasi, keseimbangan kekuatan*

---

### **1. Pendahuluan**

Hubungan antara Republik Rakyat Tiongkok (RRT/Tiongkok) dan Taiwan memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks. Taiwan dulunya merupakan bagian dari Tiongkok daratan dan dianggap sebagai provinsi Tiongkok. Setelah kekalahan Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949, pemerintah nasionalis Kuomintang di bawah Chiang Kai-shek melarikan diri ke Taiwan. Tiongkok daratan yang kemudian dikuasai oleh Partai Komunis menyatakan Taiwan sebagai wilayah yang memisahkan diri.

Tiongkok menganut prinsip "Satu Tiongkok" yang menyatakan bahwa Taiwan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Tiongkok. Tiongkok menolak pengakuan kedaulatan Taiwan sebagai negara yang terpisah. Prinsip ini menjadi dasar klaim Tiongkok atas Taiwan. Meskipun Taiwan mengklaim diri sebagai negara merdeka, Tiongkok terus mengancam akan menggunakan kekuatan militer jika Taiwan memproklamasikan kemerdekaan secara resmi. Situasi ini menciptakan status quo yang tegang di Selat Taiwan. Tiongkok melihat Taiwan sebagai isu kedaulatan dan identitas nasional yang sensitif. Taiwan sendiri memiliki identitas nasional yang semakin terpisah dari Tiongkok daratan seiring berjalannya waktu. Hal ini semakin memperumit dinamika hubungan kedua pihak (Maizland, 2024).

Hubungan antara Tiongkok dan Taiwan telah lama diwarnai oleh ketegangan dan ancaman militer. Meskipun Taiwan menganggap dirinya sebagai negara yang berdaulat, Tiongkok tetap mengklaim pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak ragu untuk mengancam intervensi militer jika Taiwan secara resmi memproklamasikan kemerdekaan (J.M, 2014; Tian & Blanchard, 2023). Dalam konteks ini, penting untuk memahami dinamika deterministik realisme, sebuah perspektif yang menekankan pada peran kekuatan militer dalam menjaga keseimbangan kekuatan dan mencegah konflik terbuka (Jervis, 1979; Zagare & Kilgour, 2000).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi aneksasi Taiwan oleh Tiongkok melalui lensa deterministik realisme. Upaya analisis masalah dilakukan dengan mengkaji faktor-faktor seperti kapabilitas militer kedua pihak, aliansi strategis, dan kepentingan nasional. Penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kemungkinan konflik terbuka di Selat Taiwan dan implikasinya bagi keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*literature review*). Data diperoleh dari sumber-sumber seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan analisis para ahli. Analisis dilakukan dengan mengombinasikan teori deterministik realisme dan data empiris terkait situasi di Selat Taiwan. Dalam mengevaluasi kapabilitas militer, penelitian ini menggunakan data kuantitatif seperti jumlah personel, alutsista, dan anggaran pertahanan. Untuk menganalisis aliansi strategis dan kepentingan nasional, penelitian ini bergantung pada analisis kualitatif dari pernyataan resmi, kebijakan luar negeri, dan perilaku negara-negara terkait.

## **3. Temuan dan Analisa**

### **3.1 Kapabilitas Militer**

Dalam konteks deterministik realisme, kapabilitas militer relatif yang dimaksud adalah perbandingan kekuatan militer antara Tiongkok dan Taiwan secara relatif satu sama lain (Ikenberry & Mearsheimer, 2001; Waltz & Mills, 1979). Hal ini mengacu pada perbandingan berbagai aspek kapabilitas militer seperti:

- a. Kekuatan personel (jumlah tentara, marinir, angkatan udara, dll) (Cohen et al., 2001)
- b. Persenjataan dan peralatan militer (senjata, pesawat tempur, kapal perang, rudal, dll) (Cordesman & Kleiber, 2007)
- c. Anggaran pertahanan dan belanja militer (Hartley, 2007)
- d. Teknologi persenjataan dan sistem pertahanan (Goldman & Mahnken, 2004)

Dalam teori ini, kapabilitas militer relatif yang lebih besar dari salah satu pihak dianggap sebagai faktor yang memengaruhi keseimbangan kekuatan dan deterrence (pencegahan) antara keduanya. Pihak dengan kapabilitas lebih besar berpotensi memiliki kemampuan deterrence yang lebih kuat (Jervis, 1979; Zagare & Kilgour, 2000)

Berdasarkan data terbaru, Tiongkok memiliki keunggulan signifikan dalam hal jumlah personel, kekuatan angkatan laut dan udara, serta persenjataan modern. Namun demikian, Taiwan memiliki sistem pertahanan yang kuat dan mendapat dukungan tidak langsung dari Amerika Serikat dalam bentuk penjualan senjata dan latihan militer bersama. Tiongkok telah meningkatkan belanja militernya secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, mencapai lebih dari \$227 miliar pada tahun 2024, sedangkan angka ini jauh melampaui anggaran pertahanan Taiwan yang hanya sekitar \$19.1 miliar pada tahun yang sama (Global Fire Power, 2024). Dengan anggaran besar tersebut, Tiongkok mampu memodernisasi kekuatan militernya secara masif, termasuk pengembangan persenjataan canggih seperti rudal balistik antarbenua, kapal selam nuklir, pesawat tempur generasi kelima, dan sistem pertahanan rudal balistik (Indo-Pasific Defense, 2023).

Selain itu, Tiongkok juga memiliki kekuatan nuklir yang cukup besar yang siap digunakan. Menurut data 2023 dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Tiongkok

diperkirakan memiliki sekitar 410 hulu ledak nuklir yang dioperasikan. Meskipun jumlah ini masih jauh di bawah Amerika Serikat dengan sekitar 5.244 hulu ledak dan Rusia dengan 5.889 hulu ledak, namun tetap merupakan ancaman yang signifikan bagi Taiwan dan negara-negara di sekitarnya (SIPRI, 2023). Di sisi lain, Taiwan memiliki sistem pertahanan yang canggih dan modern, meskipun secara kuantitatif kalah jauh dari Tiongkok. Taiwan mengandalkan kekuatan militer yang kompak, terlatih dengan baik, dan dilengkapi dengan persenjataan canggih seperti rudal jarak jauh, sistem pertahanan udara yang kuat, dan kapal selam diesel-elektrik. Salah satu keunggulan utama Taiwan adalah kemampuannya untuk mempertahankan pulau dengan sistem pertahanan yang terintegrasi dan modern, termasuk rudal jarak dekat dan menengah yang dapat menasar sasaran di daratan Tiongkok (U.S Department of Defense, 2022)

Dukungan dari Amerika Serikat juga membantu memperkuat posisi Taiwan dalam hal transfer teknologi militer dan latihan bersama. Meskipun tidak ada jaminan intervensi militer langsung, dukungan Amerika Serikat merupakan faktor pengimbang penting dalam menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan.

**Tabel 1.1 Perbandingan Kapabilitas Militer**

Faktor Kapabilitas Militer	Tiongkok	Taiwan
Anggaran Pertahanan (2024)	\$227 miliar	\$19,1 miliar
Jumlah Personel Militer	2,1 juta aktif	215.000 aktif
Kekuatan Angkatan Laut	730 unit	93 kapal perang
Kekuatan Angkatan Udara	3.304 unit	750 pesawat
Kekuatan Darat	187.764 unit	22.521 unit
Kekuatan Nuklir	Memiliki senjata nuklir	Tidak memiliki senjata nuklir
Sistem Pertahanan	Sistem pertahanan rudal balistik	Sistem pertahanan udara terintegrasi
Dukungan Internasional	Aliansi dengan Rusia, hubungan baik dengan negara Asia	Dukungan militer dari AS, hubungan erat dengan Jepang

Sumber: Global Fire Power 2024

### 3.2 Aliansi Strategis

Aliansi strategis juga berperan penting dalam memelihara keseimbangan kekuatan di kawasan. Taiwan memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara lain yang menentang upaya aneksasi Tiongkok. Sebaliknya, Tiongkok memiliki hubungan baik dengan Rusia dan beberapa negara lain yang mungkin tidak mendukung intervensi militer di Taiwan. Amerika Serikat merupakan sekutu utama Taiwan dalam hal dukungan militer dan politik. Meskipun secara resmi tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, Amerika Serikat telah menjual senjata canggih kepada Taiwan dan memberikan jaminan keamanan melalui *Taiwan Relations Act*<sup>1</sup>. Hubungan ini menjadi penghalang signifikan bagi Tiongkok untuk melakukan invasi militer terhadap Taiwan, karena dapat memicu keterlibatan Amerika Serikat secara langsung atau tidak langsung.

Selain Amerika Serikat, Taiwan juga memiliki hubungan erat dengan Jepang, yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Jepang secara terbuka mendukung Taiwan dalam berbagai isu, termasuk mencegah upaya aneksasi oleh Tiongkok. Jepang memiliki sejumlah

<sup>1</sup> Taiwan Relations Act (TRA) adalah undang-undang yang disahkan oleh Kongres AS pada 1979 untuk mengatur hubungan dengan Taiwan setelah AS memutuskan hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan dan mengakui Tiongkok. TRA menegaskan komitmen AS untuk membantu mempertahankan kemampuan pertahanan Taiwan dan memastikan masa depan Taiwan ditentukan melalui cara-cara damai. Undang-undang ini juga mengizinkan penjualan senjata defensif ke Taiwan (Taiwan Relation Act, 1979).

kepentingan strategis dalam mendukung Taiwan dan mencegah upaya aneksasi oleh Tiongkok. Pertama, dari perspektif keamanan regional, Jepang khawatir jika Taiwan jatuh ke tangan Tiongkok, hal ini akan mengancam keseimbangan kekuatan di kawasan dan memberi Tiongkok kontrol lebih besar atas jalur perdagangan maritim yang vital bagi Jepang (Panda, 2023). Kedua, sebagai negara yang menjunjung tinggi kedaulatan dan integritas teritorial, Jepang mendukung prinsip bahwa tidak boleh ada perubahan status quo secara sepihak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan di kawasan, sesuai dengan hukum internasional. Dukungan pada Taiwan merupakan penegasan prinsip ini (Liff, 2021).

Selain itu, sebagai negara demokratis, Jepang cenderung mendukung Taiwan yang juga merupakan demokrasi, alih-alih Tiongkok yang otoriter (Harding & Sevastopulo, 2021). Dari sisi ekonomi, Taiwan merupakan mitra dagang penting Jepang, sehingga gangguan atas hubungan ini dapat berdampak negatif pada ekonomi Jepang. Terakhir, Jepang juga memiliki kekhawatiran bahwa jika aneksasi Taiwan berhasil, Tiongkok mungkin akan semakin ekspansif dan agresif di kawasan, termasuk terkait sengketa Kepulauan Senkaku/Diaoyu dengan Jepang (Sacks & Stares, n.d.). Jadi secara umum, dukungan Jepang pada Taiwan didasari faktor keamanan, ekonomi, politik, dan pertahanan kawasan guna menjaga status quo dan mencegah dominasi Tiongkok yang mengancam kepentingannya.

Meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, Jepang telah menyediakan bantuan ekonomi dan teknis kepada Taiwan, serta berkomitmen untuk membantu menjaga keamanan dan stabilitas di Selat Taiwan. Di sisi lain, Tiongkok memiliki aliansi kuat dengan Rusia, terutama dalam konteks konflik dengan Barat. Rusia kemungkinan besar tidak akan mendukung intervensi militer Tiongkok di Taiwan, tetapi juga tidak akan mengambil tindakan untuk mencegahnya. Aliansi ini didasarkan pada kepentingan bersama dalam menghadapi pengaruh Amerika Serikat dan negara-negara Barat di kawasan. Selain itu, Tiongkok juga memiliki hubungan baik dengan beberapa negara di kawasan Asia yang mungkin tidak akan mengambil sikap tegas dalam konflik Taiwan. Negara-negara seperti Pakistan, Kamboja, dan beberapa negara ASEAN lainnya cenderung menghindari konfrontasi dengan Tiongkok karena alasan ekonomi dan politik. Meskipun tidak secara resmi mendukung upaya aneksasi, sikap ini dapat memperkuat posisi Tiongkok dalam situasi konflik terbuka.

### **3.3 Kepentingan Nasional**

Selain kapabilitas militer dan aliansi strategis, kepentingan nasional masing-masing pihak juga perlu dipertimbangkan dalam dinamika deterministik realisme. Bagi Tiongkok, menganeksasi Taiwan dianggap sebagai bagian dari pemulihan integritas wilayah dan harga diri nasional (Swaine, 2015). Sedangkan bagi Taiwan, mempertahankan kemerdekaan adalah prioritas utama untuk menjaga identitas dan kedaulatan negara (Bush, 2021). Bagi Tiongkok, Taiwan merupakan bagian integral dari wilayahnya yang terpisah secara sementara akibat konflik internal pada abad ke-20 (Scobell, 2005). Pemerintah Tiongkok menganggap reunifikasi dengan Taiwan sebagai agenda nasional yang penting, tidak hanya dari perspektif wilayah, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan kebangkitan Tiongkok di panggung internasional (Doshi, 2021). Kegagalan dalam menganeksasi Taiwan dapat dianggap sebagai kekalahan besar bagi pemerintah Tiongkok dan berpotensi menggoyahkan legitimasi rezim berkuasa (Kastner, 2016).

Penguasaan Taiwan juga memiliki implikasi strategis bagi Tiongkok dalam konteks persaingan kekuatan global. Dengan menguasai Taiwan, Tiongkok dapat memperluas proyeksi kekuatan maritimnya di Laut Cina Selatan dan Pasifik Barat, serta memperkuat posisinya dalam konflik dengan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya (Yoshihara & Holmes, 2012). Hal ini sejalan dengan ambisi Tiongkok untuk menjadi kekuatan regional dan global yang dominan. Sebaliknya, bagi Taiwan, mempertahankan kemerdekaan dan identitas nasional adalah prioritas utama. Taiwan telah berkembang menjadi demokrasi yang mapan dengan identitas nasional yang kuat, terpisah dari Tiongkok daratan (Bush, 2021). Pemerintah Taiwan menganggap bahwa aneksasi oleh

Tiongkok akan mengakhiri kemerdekaan dan merusak pencapaian politik, ekonomi, dan sosial yang telah dicapai selama bertahun-tahun (Rigger et al., 2017).

Taiwan juga khawatir bahwa aneksasi oleh Tiongkok akan mengancam sistem demokrasi dan kebebasan sipil yang telah mereka bangun dengan susah payah (Bush, 2021). Tiongkok dikenal dengan sistem pemerintahan yang otoriter dan pembatasan kebebasan politik, sehingga banyak warga Taiwan yang menentang upaya reunifikasi dengan alasan ideologis (Blanchard, 2019).

### **3.4 Analisis Deterministik Realisme**

Analisis deterministik realisme mengungkapkan bahwa potensi aneksasi Taiwan oleh Tiongkok merupakan sebuah kemungkinan yang harus dipertimbangkan secara serius. Meskipun konflik terbuka belum terjadi, faktor-faktor seperti kapabilitas militer, aliansi strategis, dan kepentingan nasional masing-masing pihak menciptakan sebuah lingkungan yang rentan terhadap eskalasi dan konflik. Tiongkok memiliki keunggulan militer yang signifikan dibandingkan Taiwan, dengan anggaran pertahanan yang jauh lebih besar, kekuatan angkatan bersenjata yang lebih besar, dan kapabilitas nuklir yang substansial. Namun demikian, Taiwan juga memiliki sistem pertahanan yang modern dan mendapat dukungan dari sekutu-sekutunya, terutama Amerika Serikat, dalam bentuk transfer teknologi militer dan latihan bersama.

Aliansi strategis juga berperan penting dalam memelihara keseimbangan kekuatan di kawasan. Taiwan memiliki hubungan erat dengan Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara lain yang menentang upaya aneksasi Tiongkok. Sebaliknya, Tiongkok memiliki hubungan baik dengan Rusia dan beberapa negara lain yang mungkin tidak akan mendukung intervensi militer di Taiwan. Selain itu, kepentingan nasional masing-masing pihak juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Bagi Tiongkok, menganeksasi Taiwan dianggap sebagai bagian dari pemulihan integritas wilayah dan harga diri nasional, sedangkan bagi Taiwan, mempertahankan kemerdekaan adalah prioritas utama untuk menjaga identitas dan kedaulatan negara.

Meskipun demikian, situasi ini tetap rentan terhadap kesalahpahaman dan eskalasi yang tidak diinginkan. Perubahan dalam kapabilitas militer, aliansi strategis, atau kebijakan luar negeri negara-negara terkait dapat mengubah keseimbangan kekuatan secara dramatis. Oleh karena itu, upaya-upaya diplomasi dan dialog yang konstruktif antara semua pihak sangat penting untuk mencegah konflik terbuka dan menjaga stabilitas di kawasan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memantau perkembangan situasi secara berkala dan menganalisis dampak potensial dari perubahan keseimbangan kekuatan atau kebijakan luar negeri negara-negara terkait. Selain itu, kajian mendalam tentang peran organisasi internasional dan komunitas global dalam mengelola konflik di Selat Taiwan juga dapat memberikan wawasan berharga bagi upaya-upaya perdamaian di masa depan.

## **4. Conclusion**

Melalui analisis deterministik realisme ditemukan bahwa faktor-faktor seperti keunggulan militer Tiongkok, aliansi strategis, dan kepentingan nasional yang mendorong aneksasi, kemungkinan aneksasi Taiwan oleh Tiongkok menjadi sangat nyata. Namun, kesimpulan ini perlu dilihat dengan hati-hati karena analisis deterministik realisme cenderung terlalu menitikberatkan pada aspek militer dan kekuatan keras, sementara faktor-faktor lain seperti ekonomi, diplomasi, dan norma internasional juga berperan penting. Selain itu, potensi perubahan keseimbangan kekuatan di masa depan dapat mengubah dinamika konflik.

Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang memantau situasi secara berkelanjutan, serta menganalisis dampak perubahan keseimbangan kekuatan dan kebijakan luar negeri negara-negara terkait, sangat diperlukan. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis militer, ekonomi, politik, dan sosial-budaya dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

## 5. Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian ini. Terima kasih kepada Muhammad Farhan, UKM Unhas Model United Nations, Internal Makassar MUN 2024, serta teman-teman jurusan Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin angkatan 2021 yang telah memberikan dukungan dan kontribusi yang berarti dalam pembuatan jurnal ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Agussalim, S.IP., MIRAP. dan Ibu Nur Isdah Idris, S.IP., M.A. sebagai dosen pengampuh mata kuliah Studi Keamanan dan Kajian Strategis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga dalam membuat jurnal ini. Semua bantuan dan dukungan yang diberikan sangat berarti bagi penulis.

## References

- Blanchard, B. (2019). China fears Taiwan's democracy the most, island's president says in election pitch. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/idUSKBN1YM1M2/>
- Bush, R. C. (2021). Taiwan's democracy and the China challenge. *Brookings*.
- Cohen, E. A., Tellis, A. J., Bially, J. L., Layne, C., McPherson, M., & Sollinger, J. M. (2001). Measuring National Power in the Postindustrial Age. In *Foreign Affairs* (Vol. 80, Issue 5). <https://doi.org/10.2307/20050283>
- Cordesman, A. H., & Kleiber, M. (2007, April 9). Chinese Military Modernization. *Center for Strategic & International Studies*. <https://www.csis.org/analysis/chinese-military-modernization>
- Defense, U. S. S. of. (2022). *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China*.
- Doshi, R. (2021). The Long Game: China's Grand Strategy to Displace American Order. *Brookings*. <https://www.brookings.edu/articles/the-long-game-chinas-grand-strategy-to-displace-american-order/>
- Goldman, E. O., & Mahnken, T. G. (2004). Information Revolution in Military Affairs in Asia. In *Palgrave Macmillan* (Vol. 5, Issue 1). <https://link.springer.com/book/10.1057/9781403980441>
- Harding, R., & Sevastopulo, D. (2021). US pushes Japan to back Taiwan at Biden-Suga summit. *Financial Times*.
- Hartley, K. (2007). Defense economics: Achievements and challenges. *The Economics of Peace and Security Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.15355/2.1.45>
- Ikenberry, G. J., & Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. *Foreign Affairs*, 80(6), 173. <https://doi.org/10.2307/20050342>
- Indo-Pacific Defense. (2023). Pertahanan Modern: Inovasi dan Aliansi Meningkatkan Militer. *Transformasi Pertahanan*, 48.
- J.M. (2014). Why China and Taiwan are divided. *The Economist*. <https://www.economist.com/the-economist-explains/2014/08/25/why-china-and-taiwan-are-divided>
- Jervis, R. (1979). Deterrence Theory Revisited. *World Politics*, 31(2), 289-324. <https://doi.org/10.2307/2009945>
- Kastner, S. L. (2016). Is the Taiwan Strait Still a Flash Point? Rethinking the Prospects for Armed Conflict Between China and Taiwan. *International Security*, 40(3), 54-92. <https://doi.org/10.1162/ISEC>
- Liff, A. P. (2021). Has Japan's policy toward the Taiwan Strait changed? *Brookings*. <https://www.brookings.edu/articles/has-japans-policy-toward-the-taiwan-strait-changed/>
- Maizland, L. (2024). Why China-Taiwan Relations Are So Tense. *Council on Foreign Relations*. <https://www.cfr.org/backgrounders/china-taiwan-relations-tension-us-policy-biden>
- Panda, J. P. (2023). Taiwan: Tokyo's New Ally? *Institute for Security & Development Policy*.

- <https://www.isdp.se/publication/taiwan-tokyos-new-ally/>
- Power, G. F. (2024). *Comparison of China and Taiwan Military Strengths* (2024). <https://www.globalfirepower.com/countries-comparison-detail.php?country1=china&country2=taiwan>
- Rigger, S., Hickey, D. V, & Chow, P. (2017). *Prospects for Security and Economic Ties*.
- Sacks, D., & Stares, P. B. (n.d.). Cross-Strait Conflict and the Risk of Horizontal Escalation. *Council on Foreign Relations*.
- Scobell, A. (2005). Strategic Culture and China: IR Theory Versus the Fortune Cookie? *Strategic Insights*, V. 6, Issue 10 (October 2005), IV(10).
- SIPRI. (2023). States invest in nuclear arsenals as geopolitical relations deteriorate. *Stockholm International Peace Research Institute*. <https://www.sipri.org/media/press-release/2023/states-invest-nuclear-arsenals-geopolitical-relations-deteriorate-new-sipri-yearbook-out-now>
- Swaine, M. D. (2015). Chinese Views and Commentary on the One Belt, One Road Initiative. *China Leadership Monitor*, 47(2), 1-24. <https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/clm47ms.pdf>
- Taiwan Relation Act. (1979). *Taiwan Relation Act*. <https://www.ait.org.tw/taiwan-relations-act-public-law-96-8-22-u-s-c-3301-et-seq/>
- Tian, Y. L., & Blanchard, B. (2023). China proffers “peaceful reunification”, Taiwan says respect our democracy. *REUTERS*. <https://www.reuters.com/world/china/china-says-should-advance-peaceful-reunification-with-taiwan-2023-03-05/>
- Waltz, K. N., & Mills, D. (1979). *Theory of International Politics*.
- Yoshihara, T., & Holmes, J. R. (2012, April). Asymmetric Warfare, American Style. *U.S. Naval Institute*. <https://www.usni.org/magazines/proceedings/2012/april/asymmetric-warfare-american-style>
- Zagare, F. C., & Kilgour, D. M. (2000). Perfect Deterrence. In *Cambridge University Press*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511491788>